



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 28 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMO 56 TAHUN 2009
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib penyusunan anggaran dalam pengelolaan keuangan desa, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 35);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Ketentuan Pasal 39 Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 56 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung

Timur Tahun 2009 Nomor 159) diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 37

- (1) Kode akun pendapatan, kode akun belanja, dan kode akun pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) merupakan bagian susunan kode akun keuangan Desa yang tercantum dalam perubahan Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Kode rekening pendapatan, belanja dan pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tercantum dalam perubahan Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Kode dan daftar program dan kegiatan menurut urusan pemerintahan Desa tercantum dalam perubahan Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Ketentuan Pasal 53 Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 56 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2009 Nomor 159) diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 53

- (1) Alokasi Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dianggarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Tahap Pertama : Kepala Desa mengajukan Surat Permohonan Penerbitan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dengan dilampiri Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa;
 - b. Tahap Kedua : Kepala Desa mengajukan Surat Permohonan Penerbitan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dengan dilampiri daftar realisasi penggunaan ADD Tahap Pertama dan Pemerintah Desa telah mempertanggungjawabkan realisasi anggaran tahun sebelumnya;
 - c. Tahap Ketiga : Kepala Desa mengajukan Surat Permohonan Penerbitan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dengan dilampiri daftar realisasi penggunaan ADD Tahap Kedua, Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APBDesa (apabila ada perubahan); dan
 - d. Tahap Keempat : Kepala Desa mengajukan Surat Permohonan Penerbitan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dengan dilampiri daftar realisasi penggunaan ADD Tahap Ketiga.
- (3) Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- (4) Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Belitung Timur akan menyalurkan Alokasi Dana Desa langsung dari kas Daerah ke rekening Desa.

- (5) Mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa dalam APBDesa dilakukan secara bertahap.
- (6) Pencairan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan tiap 3 (tiga) bulan.
- (7) Format daftar realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Perubahan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 8 Juni 2010

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAI RUL EFENDI

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 9 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ERWANDI A. RANI
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP.19591013 198701 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2010 NOMOR 187

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR TAHUN 2010
TANGGAL DESEMBER 2010

KODE AKUN KEUANGAN DESA

KODE REKENING	URAIAN
4.	PENDAPATAN
5.	BELANJA
6.	PEMBIAYAAN

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAI RUL EFENDI

KABUPATEN BELITUNG TIMUR
 KODE REKENING PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DESA

KODE REKENING	URAIAN
4	PENDAPATAN
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DESA
4 . 1 . 1	Hasil Usaha Desa
4 . 1 . 1 . 1	Penyewaan Kendaraan
4 . 1 . 1 . 1 . 1	Truk Desa
4 . 1 . 1 . 1 . 2	Perahu Motor
4 . 1 . 1 . 1 . 3
4 . 1 . 1 . 2	Penyewaan Sarana dan Prasarana Kantor
4 . 1 . 1 . 2 . 1	Sewa Kursi
4 . 1 . 1 . 2 . 2	SewaTenda
4 . 1 . 1 . 2 . 3	Sewa Genset
4 . 1 . 1 . 2 . 4	Sewa Balai Desa
4 . 1 . 1 . 2 . 5
4 . 1 . 1 . 3	Penerimaan Jasa Surat Menyurat
4 . 1 . 1 . 3 . 1	Surat Menyurat
4 . 1 . 1 . 3 . 2
4 . 1 . 2	Hasil Kekayaan Desa
4 . 1 . 2 . 1	Tanah Kas Desa
4 . 1 . 2 . 1 . 1	Tanah Kas di Dsn
4 . 1 . 2 . 1 . 2	Tanah Kas di Dsn
4 . 1 . 2 . 1 . 3
4 . 1 . 2 . 2	Pasar Desa
4 . 1 . 2 . 2 . 1	Pasar Desa di
4 . 1 . 2 . 2 . 2	Pasar Desa di
4 . 1 . 2 . 2 . 3
4 . 1 . 3	Hasil Swadaya dan Partisipasi
4 . 1 . 3 . 1	Pungutan/Sumbangan Pengambilan Hasil Hutan
4 . 1 . 3 . 1 . 1	Kayu Dolog
4 . 1 . 3 . 1 . 2	Kayu Olahan
4 . 1 . 3 . 1 . 3	Kayu Junjungan
4 . 1 . 3 . 1 . 4	Rotan
4 . 1 . 3 . 1 . 5	Damar
4 . 1 . 3 . 1 . 6
4 . 1 . 3 . 2	Pungutan/Sumbangan Sarana Prasarana Kelautan Perikanan
4 . 1 . 3 . 2 . 1	Kepemilikan Perahu
4 . 1 . 3 . 2 . 2	Tambatan Perahu
4 . 1 . 3 . 2 . 3	Kepemilikan Bagan
4 . 1 . 3 . 2 . 4
4 . 1 . 3 . 3	Pungutan/Sumbangan Hasil Kelautan Perikanan
4 . 1 . 3 . 3 . 1	Usaha Penangkapan Hasil Laut
4 . 1 . 3 . 3 . 2	Usaha Penampungan Hasil Laut
4 . 1 . 3 . 3 . 3	Kepemilikan Tambak
4 . 1 . 3 . 3 . 4

4 . 1 . 3 . 4	Pungutan/Sumbangan Pengusaha Tambang
KODE REKENING	URAIAN
4 . 1 . 3 . 4 . 1	Pengusaha Penampung Biji Timah
4 . 1 . 3 . 4 . 2	Pengusaha Penambang Biji Timah
4 . 1 . 3 . 4 . 3	Pengusaha Pasir Bangunan
4 . 1 . 3 . 4 . 4	Pengusaha Tanah Puru
4 . 1 . 3 . 4 . 5	Pengusaha Batu Gunung
4 . 1 . 3 . 4 . 6
4 . 1 . 3 . 5	Pungutan/Sumbangan Pengusaha Pertambangan
4 . 1 . 3 . 5 . 1	Pengusaha Kios Bensin
4 . 1 . 3 . 5 . 2	Pengusaha Pangkalan Minyak Tanah
4 . 1 . 3 . 5 . 3	Pengusaha Toko/Warung
4 . 1 . 3 . 5 . 4	Pengusaha Rental PS
4 . 1 . 3 . 5 . 5	Pengusaha Rental Alat Berat
4 . 1 . 3 . 5 . 6
4 . 1 . 4	Hasil Gotong Royong
4 . 1 . 4 . 1
4 . 1 . 5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah
4 . 1 . 5 . 1	Bunga Bank
4 . 1 . 5 . 1 . 1	Bank
4 . 1 . 5 . 1 . 2	Bank
4 . 1 . 5 . 2	Bunga Deposito
4 . 1 . 5 . 2 . 1	Deposito pada Bank
4 . 1 . 5 . 2 . 2	Deposito pada Bank
4 . 2	BAGI HASIL PAJAK DAERAH
4 . 2 . 1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota
4 . 2 . 2	Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan
4 . 3	BAGIAN DARI RETRIBUSI DAERAH
4 . 3 . 1	Bagi Hasil Retribusi Kabupaten/Kota
4 . 4	BAGIAN DANA PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
4 . 4 . 1	Alokasi Dana Desa
4 . 4 . 1 . 1	Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM)
4 . 4 . 1 . 2	Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP)
4 . 5	BANTUAN KEUANGAN
4 . 5 . 1	Bantuan Keuangan Pemerintah
4 . 5 . 2	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi
4 . 5 . 3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
4 . 6	HIBAH DAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA
4 . 6 . 1	Hibah
4 . 6 . 1 . 1	Hibah dari pemerintah
4 . 6 . 1 . 2	Hibah dari pemerintah provinsi
4 . 6 . 1 . 3	Hibah dari pemerintah kabupaten/kota
4 . 6 . 1 . 4	Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta
4 . 6 . 1 . 5	Hibah dari kelompok masyarakat/ perorangan
4 . 6 . 1 . 6	dan seterusnya.....
4 . 6 . 2	Sumbangan Pihak Ketiga
4 . 6 . 2 . 1	Sumbangan dari
4 . 6 . 2 . 2	dan seterusnya.....

KODE REKENING	URAIAN
5	BELANJA
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.1.1	Belanja Pegawai
5.1.1.1	Penghasilan Tetap
5.1.1.1.1	Penghasilan Tetap Kepala Desa
5.1.1.1.2	Penghasilan Tetap Perangkat Desa
5.1.1.1.3	Penghasilan Tetap BPD
5.1.1.2	Tambahan Penghasilan
5.1.1.2.1	Tambahan penghasilan Kepala Desa
5.1.1.2.2	Tambahan penghasilan Perangkat Desa
5.1.1.2.3	Tambahan penghasilan BPD
5.1.1.3	Tunjangan
5.1.1.3.1	Tunjangan Kesehatan
5.1.1.3.2	Tunjangan Kecelakaan
5.1.1.3.3	Tunjangan Kematian
5.1.1.3.4	Tunjangan Purnabakti
5.1.2	Belanja Subsidi
5.1.2.1	Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga
5.1.2.1.1	Belanja Subsidi kepada Perusahaan
5.1.2.1.2	Belanja Subsidi kepada Lembaga
5.1.3	Belanja Hibah
5.1.3.1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah
5.1.3.1.1	Pemerintah Daerah
5.1.3.2	Belanja Hibah kepada Pemerintah Desa
5.1.3.2.1	Pemerintah Desa
5.1.3.3	Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMDes
5.1.3.3.1	Perusahaan Daerah/BUMDes
5.1.3.4	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi
5.1.3.4.1	Badan/Lembaga/Organisasi
5.1.3.4.2	Organisasi Wanita
5.1.3.4.3	Organisasi Pendidikan Keagamaan
5.1.3.4.4	Organisasi Kepemudaan
5.1.3.5	Belanja Hibah Pilkades
5.1.3.5.1	Belanja Hibah Kepada Panitia Pilkades
5.1.4	Belanja Bantuan Sosial
5.1.4.1	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan
5.1.4.1.1	Belanja Bantuan Sosial kpd Panti Asuhan, Usia Lanjut dan Anak Terlantar
5.1.4.1.2	Belanja Bantuan Sosial kpd Organisasi Wanita
5.1.4.1.3	Belanja Bantuan Sosial kpd Organisasi Pendidikan Keagamaan
5.1.4.1.4	Belanja Bantuan Sosial kpd Organisasi Pendidikan Sosial
5.1.4.1.5	Belanja Bantuan Sosial kpd Organisasi Kepemudaan
5.1.4.1.6	Belanja Bantuan Sosial kpd Organisasi Olahraga Kemasyarakatan
5.1.4.1.7	Belanja Bantuan Sosial kpd Organisasi Kesenian dan budaya
5.1.4.1.8	Belanja Bantuan Sosial kpd Organisasi Keagamaan
5.1.4.1.9	Belanja Bantuan Sosial kpd Organisasi Kesehatan
5.1.5	Belanja Bantuan Keuangan
5.1.5.1	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa lainnya
5.1.5.1.1	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa ...
5.1.6	Belanja Tidak Terduga
5.1.6.1	Belanja Tidak Terduga
5.1.6.1.1	Belanja Tidak Terduga
5.2	BELANJA LANGSUNG
5.2.1	Belanja Pegawai
5.2.1.1	Belanja Honorarium Perangkat Desa
5.2.1.1.1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.1.2	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa
5.2.1.1.3	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
5.2.1.1.4	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang
5.2.1.1.5	Honorarium Perangkat Desa Lainnya

KODE REKENING	URAIAN
5 . 2 . 1 . 1 . 6	Honorarium Pengelola Keuangan
5 . 2 . 1 . 2	Belanja Honorarium Non Perangkat Desa
5 . 2 . 1 . 2 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5 . 2 . 1 . 2 . 2	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
5 . 2 . 1 . 2 . 3	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5 . 2 . 1 . 2 . 4	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang
5 . 2 . 1 . 2 . 5	Honorarium Non Perangkat Desa Lainnya
5 . 2 . 1 . 2 . 4	Honorarium Pengelola Keuangan
5 . 2 . 1 . 5	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Perangkat Desa
5 . 2 . 1 . 5 . 1	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan
5 . 2 . 1 . 5 . 2	Belanja Sosialisasi
5 . 2 . 1 . 5 . 3	Belanja bimbingan teknis
5 . 2 . 1 . 5 . 4	Belanja Pendidikan dan Pelatihan
5 . 2 . 1 . 5 . 5	Belanja Kursus/Sosialisasi/Bimtek/Diklat lainnya
5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
5 . 2 . 2 . 1	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
5 . 2 . 2 . 1 . 1	Belanja Alat Tulis kantor
5 . 2 . 2 . 1 . 2	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)
5 . 2 . 2 . 1 . 3	Belanja Pengisian Tabung Oksigen
5 . 2 . 2 . 1 . 4	Belanja Peranko, Materai dan Benda Pos Lainnya
5 . 2 . 2 . 1 . 5	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
5 . 2 . 2 . 1 . 6	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
5 . 2 . 2 . 1 . 7	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
5 . 2 . 2 . 1 . 8	Belanja Bahan Pakai habis kantor lainnya
5 . 2 . 2 . 2	Belanja Bahan/Material
5 . 2 . 2 . 2 . 1	Belanja Bahan Baku Bangunan
5 . 2 . 2 . 2 . 2	Belanja Bahan / Bibit Tanaman
5 . 2 . 2 . 2 . 3	Belanja Bibit Ternak/Ikan
5 . 2 . 2 . 2 . 4	Belanja Bahan Obat-obatan
5 . 2 . 2 . 2 . 5	Belanja Bahan Kimia
5 . 2 . 2 . 2 . 6	Belanja Bendera, Spanduk dan Umbul-umbul
5 . 2 . 2 . 2 . 7	Belanja Bahan Hadiah, Bingkisan dan Trophy
5 . 2 . 2 . 2 . 8	Belanja Bahan Dokumentasi
5 . 2 . 2 . 2 . 9	Belanja Bahan/Material Pendukung Lainnya
5 . 2 . 2 . 3	Belanja Jasa Kantor
5 . 2 . 2 . 3 . 1	Belanja Telepon
5 . 2 . 2 . 3 . 2	Belanja Air
5 . 2 . 2 . 3 . 3	Belanja Listrik
5 . 2 . 2 . 3 . 4	Belanja jasa pengumuman lelang/pemenang lelang
5 . 2 . 2 . 3 . 5	Belanja Surat Kabar / Majalah
5 . 2 . 2 . 3 . 6	Belanja Kawat / Faksimili/ Internet
5 . 2 . 2 . 3 . 7	Belanja Paket / Pengiriman
5 . 2 . 2 . 3 . 8	Belanja Sertifikasi
5 . 2 . 2 . 3 . 9	Jasa Kantor Lainnya
5 . 2 . 2 . 5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5 . 2 . 2 . 5 . 1	Belanja Jasa Service
5 . 2 . 2 . 5 . 2	Belanja Penggantian Suku Cadang
5 . 2 . 2 . 5 . 3	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5 . 2 . 2 . 5 . 4	Belanja Penggantian ACCU
5 . 2 . 2 . 5 . 5	Belanja Penggantian Ban
5 . 2 . 2 . 5 . 7	Belanja Perawatan kendaraan bermotor lainnya
5 . 2 . 2 . 6	Belanja Cetak dan Penggandaan
5 . 2 . 2 . 6 . 1	Belanja Cetak dan Penggandaan
5 . 2 . 2 . 6 . 2	Belanja Fotocopy
5 . 2 . 2 . 6 . 3	Belanja Penjilidan
5 . 2 . 2 . 6 . 4	Belanja Dokumentasi
5 . 2 . 2 . 7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5 . 2 . 2 . 7 . 1	Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas
5 . 2 . 2 . 7 . 2	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat

KODE REKENING	URAIAN
5 . 2 . 2 . 7 . 3	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
5 . 2 . 2 . 7 . 4	Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas
5 . 2 . 2 . 7 . 5	Belanja Sewa Lainnya
5 . 2 . 2 . 8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5 . 2 . 2 . 8 . 1	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
5 . 2 . 2 . 8 . 2	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air
5 . 2 . 2 . 8 . 3	Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara
5 . 2 . 2 . 8 . 4	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Lainnya
5 . 2 . 2 . 9	Belanja Sewa Alat Berat
5 . 2 . 2 . 9 . 1	Belanja sewa Eskavator
5 . 2 . 2 . 9 . 2	Belanja sewa Buldoser
5 . 2 . 2 . 9 . 3	Belanja Sewa Alat Berat lainnya
5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5 . 2 . 2 . 10 . 1	Belanja sewa meja kursi
5 . 2 . 2 . 10 . 2	Belanja sewa komputer dan printer
5 . 2 . 2 . 10 . 3	Belanja sewa proyektor
5 . 2 . 2 . 10 . 4	Belanja sewa generator
5 . 2 . 2 . 10 . 5	Belanja sewa tenda
5 . 2 . 2 . 10 . 6	Belanja sewa pakaian adat/tradisional
5 . 2 . 2 . 10 . 7	Belanja sewa Lighting
5 . 2 . 2 . 10 . 8	Belanja sewa Sound System
5 . 2 . 2 . 10 . 9	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor lainnya
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman
5 . 2 . 2 . 11 . 1	Belanja makanan dan minuman harian pegawai
5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja makanan dan minuman rapat
5 . 2 . 2 . 11 . 3	Belanja makanan dan minuman tamu
5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Harian Non Pegawai
5 . 2 . 2 . 11 . 5	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya
5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
5 . 2 . 2 . 12 . 1	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
5 . 2 . 2 . 12 . 2	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
5 . 2 . 2 . 12 . 3	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
5 . 2 . 2 . 12 . 4	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja
5 . 2 . 2 . 13 . 1	Belanja Pakaian Kerja Lapangan
5 . 2 . 2 . 13 . 2	Belanja Pakaian Kerja Lain-lain
5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
5 . 2 . 2 . 14 . 1	Belanja Pakaian Pramuka
5 . 2 . 2 . 14 . 2	Belanja pakaian KORPRI
5 . 2 . 2 . 14 . 3	Belanja pakaian adat daerah
5 . 2 . 2 . 14 . 4	Belanja pakaian batik tradisional
5 . 2 . 2 . 14 . 5	Belanja pakaian olahraga
5 . 2 . 2 . 14 . 6	Belanja Pakaian dan Atribut Paskibra
5 . 2 . 2 . 14 . 7	Belanja Pakaian lainnya
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas
5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja perjalanan dinas luar daerah
5 . 2 . 2 . 15 . 3	Belanja perjalanan dinas luar negeri
5 . 2 . 2 . 16	Belanja Perjalanan Pindah Tugas
5 . 2 . 2 . 16 . 1	Belanja perjalanan pindah tugas dalam daerah
5 . 2 . 2 . 16 . 2	Belanja perjalanan pindah tugas luar daerah
5 . 2 . 2 . 17	Belanja Pemulangan Pegawai
5 . 2 . 2 . 17 . 1	Belanja pemulangan pegawai yang pensiun dalam daerah
5 . 2 . 2 . 17 . 2	Belanja pemulangan pegawai yang pensiun luar daerah
5 . 2 . 2 . 17 . 3	Belanja pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas
5 . 2 . 2 . 18	Belanja Jasa Pihak Ketiga
5 . 2 . 2 . 18 . 1	Belanja Transportasi Dan Akomodasi
5 . 2 . 2 . 18 . 2	Belanja Dekorasi
5 . 2 . 2 . 18 . 3	Belanja Jasa Penyiaran

KODE REKENING	URAIAN
5 . 2 . 2 . 18 . 4	Belanja Uang Penghargaan
5 . 2 . 2 . 18 . 5	Belanja Jasa Publikasi
5 . 2 . 2 . 18 . 6	Belanja Jasa Hiburan
5 . 2 . 2 . 18 . 7	Belanja Jasa Konsultansi
5 . 2 . 2 . 18 . 8	Biaya Jasa Cleaning Service
5 . 2 . 2 . 18 . 9	Belanja Jasa KIR Kendaraan
5 . 2 . 2 . 18 . 10	Belanja Jasa STNK
5 . 2 . 2 . 18 . 11	Belanja Jasa SIM
5 . 2 . 2 . 18 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga Lainnya
5 . 2 . 2 . 19	Belanja Pemeliharaan
5 . 2 . 2 . 19 . 1	Belanja Pemeliharaan Gedung
5 . 2 . 2 . 19 . 2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5 . 2 . 2 . 19 . 3	Belanja Pemeliharaan Lainnya
5 . 2 . 3	Belanja Modal
5 . 2 . 3 . 1	Belanja Modal Pengadaan Tanah
5 . 2 . 3 . 1 . 1	Belanja modal Pengadaan tanah kantor
5 . 2 . 3 . 1 . 2	Belanja modal Pengadaan tanah sarana kesehatan rumah sakit
5 . 2 . 3 . 1 . 3	Belanja modal Pengadaan tanah sarana kesehatan puskesmas
5 . 2 . 3 . 1 . 4	Belanja modal Pengadaan tanah sarana kesehatan poliklinik
5 . 2 . 3 . 1 . 5	Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan taman kanak-kanak
5 . 2 . 3 . 1 . 6	Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan sekolah dasar
5 . 2 . 3 . 1 . 7	Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan menengah umum dan kejuruan
5 . 2 . 3 . 1 . 8	Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan menengah lanjutan dan kejuruan
5 . 2 . 3 . 1 . 9	Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan luar biasa/khusus
5 . 2 . 3 . 1 . 10	Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan pelatihan dan kursus
5 . 2 . 3 . 1 . 11	Belanja modal Pengadaan tanah sarana sosial panti asuhan
5 . 2 . 3 . 1 . 12	Belanja modal Pengadaan tanah sarana sosial panti jompo
5 . 2 . 3 . 1 . 13	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum terminal
5 . 2 . 3 . 1 . 14	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum dermaga
5 . 2 . 3 . 1 . 15	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum lapangan terbang perintis
5 . 2 . 3 . 1 . 16	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum rumah potong hewan
5 . 2 . 3 . 1 . 17	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum tempat pelelangan ikan
5 . 2 . 3 . 1 . 18	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum pasar
5 . 2 . 3 . 1 . 19	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum tempat pembuangan akhir sampah
5 . 2 . 3 . 1 . 20	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum taman
5 . 2 . 3 . 1 . 21	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum pusat hiburan rakyat
5 . 2 . 3 . 1 . 22	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum ibadah
5 . 2 . 3 . 1 . 23	Belanja modal Pengadaan tanah sarana stadion olahraga
5 . 2 . 3 . 1 . 24	Belanja modal Pengadaan tanah perumahan
5 . 2 . 3 . 1 . 25	Belanja modal Pengadaan tanah pertanian
5 . 2 . 3 . 1 . 26	Belanja modal Pengadaan tanah perkebunan
5 . 2 . 3 . 1 . 27	Belanja modal Pengadaan tanah perikanan
5 . 2 . 3 . 1 . 28	Belanja modal Pengadaan tanah peternakan
5 . 2 . 3 . 1 . 29	Belanja modal Pengadaan tanah perkampungan
5 . 2 . 3 . 1 . 30	Belanja modal Pengadaan tanah pergudangan/tempat penimbunan material bahan baku
5 . 2 . 3 . 2	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat
5 . 2 . 3 . 2 . 1	Belanja modal Pengadaan traktor
5 . 2 . 3 . 2 . 2	Belanja modal Pengadaan buldozer
5 . 2 . 3 . 2 . 3	Belanja modal Pengadaan stoom wals
5 . 2 . 3 . 2 . 4	Belanja modal Pengadaan eskavator
5 . 2 . 3 . 2 . 5	Belanja modal Pengadaan dump truk
5 . 2 . 3 . 2 . 6	Belanja modal Pengadaan crane
5 . 2 . 3 . 2 . 7	Belanja modal Pengadaan kendaraan penyapu jalan
5 . 2 . 3 . 2 . 8	Belanja modal Pengadaan mesin pengolah semen
5 . 2 . 3 . 2 . 9	Belanja modal Pengadaan mesin pengolah air bersih (reservoir osmosis)
5 . 2 . 3 . 3	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor

KODE REKENING	URAIAN
5 . 2 . 3 . 3 . 1	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sedan
5 . 2 . 3 . 3 . 2	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor jeep
5 . 2 . 3 . 3 . 3	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon
5 . 2 . 3 . 3 . 4	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor bus
5 . 2 . 3 . 3 . 5	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus
5 . 2 . 3 . 3 . 6	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck
5 . 2 . 3 . 3 . 7	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor tangki (air, minyak, tinja)
5 . 2 . 3 . 3 . 8	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor boks
5 . 2 . 3 . 3 . 9	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up
5 . 2 . 3 . 3 . 10	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulans
5 . 2 . 3 . 3 . 11	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pemadam kebakaran
5 . 2 . 3 . 3 . 12	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor
5 . 2 . 3 . 3 . 13	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor lift/elevator
5 . 2 . 3 . 3 . 14	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor tangga berjalan
5 . 2 . 3 . 4	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor
5 . 2 . 3 . 4 . 1	Belanja modal Pengadaan gerobak
5 . 2 . 3 . 4 . 2	Belanja modal Pengadaan pedati/delman/dokar/bendi/cidomo/andong
5 . 2 . 3 . 4 . 3	Belanja modal Pengadaan becak
5 . 2 . 3 . 4 . 4	Belanja modal Pengadaan sepeda
5 . 2 . 3 . 4 . 5	Belanja modal Pengadaan karavan
5 . 2 . 3 . 5	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Bermotor
5 . 2 . 3 . 5 . 1	Belanja modal Pengadaan kapal motor
5 . 2 . 3 . 5 . 2	Belanja modal Pengadaan kapal feri
5 . 2 . 3 . 5 . 3	Belanja modal Pengadaan speed boat
5 . 2 . 3 . 5 . 4	Belanja modal Pengadaan motor boat/motor tempel
5 . 2 . 3 . 5 . 5	Belanja modal Pengadaan hydro foil
5 . 2 . 3 . 5 . 6	Belanja modal Pengadaan jet foil
5 . 2 . 3 . 5 . 7	Belanja modal Pengadaan kapal tug boat
5 . 2 . 3 . 5 . 8	Belanja modal Pengadaan kapal tanker
5 . 2 . 3 . 5 . 9	Belanja modal Pengadaan kapal kargo
5 . 2 . 3 . 6	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Tidak Bermotor
5 . 2 . 3 . 6 . 1	Belanja modal Pengadaan perahu layar
5 . 2 . 3 . 6 . 2	Belanja modal Pengadaan perahu sampan
5 . 2 . 3 . 6 . 3	Belanja modal Pengadaan perahu tongkang
5 . 2 . 3 . 6 . 4	Belanja modal Pengadaan perahu karet
5 . 2 . 3 . 6 . 5	Belanja modal Pengadaan perahu rakit
5 . 2 . 3 . 6 . 6	Belanja modal Pengadaan perahu sekoci
5 . 2 . 3 . 7	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Udara
5 . 2 . 3 . 7 . 1	Belanja modal Pengadaan pesawat kargo
5 . 2 . 3 . 7 . 2	Belanja modal Pengadaan pesawat penumpang
5 . 2 . 3 . 7 . 3	Belanja modal Pengadaan pesawat helikopter
5 . 2 . 3 . 7 . 4	Belanja modal Pengadaan pesawat pemadam kebakaran
5 . 2 . 3 . 7 . 5	Belanja modal Pengadaan pesawat capung
5 . 2 . 3 . 7 . 6	Belanja modal Pengadaan pesawat terbang ampibi
5 . 2 . 3 . 7 . 7	Belanja modal Pengadaan pesawat terbang layang
5 . 2 . 3 . 8	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel
5 . 2 . 3 . 8 . 1	Belanja modal Pengadaan mesin las
5 . 2 . 3 . 8 . 2	Belanja modal Pengadaan mesin bubut
5 . 2 . 3 . 8 . 3	Belanja modal Pengadaan mesin dongkrak
5 . 2 . 3 . 8 . 4	Belanja modal Pengadaan mesin kompresor
5 . 2 . 3 . 8 . 5	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel Lainnya
5 . 2 . 3 . 9	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan
5 . 2 . 3 . 9 . 1	Belanja modal Pengadaan penggiling hasil pertanian
5 . 2 . 3 . 9 . 2	Belanja modal Pengadaan alat pengering gabah
5 . 2 . 3 . 9 . 3	Belanja modal Pengadaan mesin bajak
5 . 2 . 3 . 9 . 4	Belanja modal Pengadaan alat penetas

KODE REKENING	URAIAN
5 . 2 . 3 . 9 . 5	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan Lainnya
5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
5 . 2 . 3 . 10 . 1	Belanja modal Pengadaan mesin tik
5 . 2 . 3 . 10 . 2	Belanja modal Pengadaan mesin hitung
5 . 2 . 3 . 10 . 3	Belanja modal Pengadaan mesin stensil
5 . 2 . 3 . 10 . 4	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy
5 . 2 . 3 . 10 . 5	Belanja modal Pengadaan mesin cetak
5 . 2 . 3 . 10 . 6	Belanja modal Pengadaan mesin jilid
5 . 2 . 3 . 10 . 7	Belanja modal Pengadaan mesin potong kertas
5 . 2 . 3 . 10 . 8	Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas
5 . 2 . 3 . 10 . 9	Belanja modal Pengadaan papan tulis elektronik
5 . 2 . 3 . 10 . 10	Belanja modal Pengadaan papan visual elektronik
5 . 2 . 3 . 10 . 11	Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran
5 . 2 . 3 . 10 . 12	Belanja Modal Pengadaan Penunjuk Waktu
5 . 2 . 3 . 10 . 13	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput
5 . 2 . 3 . 10 . 14	Belanja Modal Pengadaan AC
5 . 2 . 3 . 10 . 15	Belanja Modal Pengadaan Televisi
5 . 2 . 3 . 10 . 16	Belanja Modal Peralatan Kantor Lainnya
5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
5 . 2 . 3 . 11 . 1	Belanja modal Pengadaan meja gambar
5 . 2 . 3 . 11 . 2	Belanja modal Pengadaan almari
5 . 2 . 3 . 11 . 3	Belanja modal Pengadaan brankas
5 . 2 . 3 . 11 . 4	Belanja modal Pengadaan filling kabinet
5 . 2 . 3 . 11 . 5	Belanja modal Pengadaan white board
5 . 2 . 3 . 11 . 6	Belanja modal Pengadaan Papan Pengumuman
5 . 2 . 3 . 11 . 7	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Olahraga
5 . 2 . 3 . 11 . 8	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan kantor lainnya
5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer
5 . 2 . 3 . 12 . 1	Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server
5 . 2 . 3 . 12 . 2	Belanja modal Pengadaan komputer/PC
5 . 2 . 3 . 12 . 3	Belanja modal Pengadaan komputer note book/Laptop
5 . 2 . 3 . 12 . 4	Belanja modal Pengadaan printer
5 . 2 . 3 . 12 . 5	Belanja modal Pengadaan scanner
5 . 2 . 3 . 12 . 6	Belanja modal Pengadaan monitor/display
5 . 2 . 3 . 12 . 7	Belanja modal Pengadaan CPU
5 . 2 . 3 . 12 . 8	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer
5 . 2 . 3 . 12 . 9	Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer
5 . 2 . 3 . 12 . 10	Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer
5 . 2 . 3 . 12 . 11	Belanja Modal Pengadaan Komputer Lainnya
5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
5 . 2 . 3 . 13 . 1	Belanja modal Pengadaan meja kerja
5 . 2 . 3 . 13 . 2	Belanja modal Pengadaan meja rapat
5 . 2 . 3 . 13 . 3	Belanja modal Pengadaan meja makan
5 . 2 . 3 . 13 . 4	Belanja modal Pengadaan kursi kerja
5 . 2 . 3 . 13 . 5	Belanja modal Pengadaan kursi rapat
5 . 2 . 3 . 13 . 6	Belanja modal Pengadaan kursi makan
5 . 2 . 3 . 13 . 7	Belanja modal Pengadaan tempat tidur
5 . 2 . 3 . 13 . 8	Belanja modal Pengadaan sofa
5 . 2 . 3 . 13 . 9	Belanja modal Pengadaan rak buku/rak tv/rak kembang
5 . 2 . 3 . 13 . 10	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer
5 . 2 . 3 . 13 . 11	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair Lainnya
5 . 2 . 3 . 14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
5 . 2 . 3 . 14 . 1	Belanja modal Pengadaan tabung gas
5 . 2 . 3 . 14 . 2	Belanja modal Pengadaan kompor gas
5 . 2 . 3 . 14 . 3	Belanja modal Pengadaan lemari makan
5 . 2 . 3 . 14 . 4	Belanja modal Pengadaan dispenser
5 . 2 . 3 . 14 . 5	Belanja modal Pengadaan kulkas
5 . 2 . 3 . 14 . 6	Belanja modal Pengadaan rak piring

KODE REKENING	URAIAN
5 . 2 . 3 . 14 . 7	Belanja modal Pengadaan Peralatan Dapur Lainnya
5 . 2 . 3 . 15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
5 . 2 . 3 . 15 . 1	Belanja modal Pengadaan lampu hias
5 . 2 . 3 . 15 . 2	Belanja modal Pengadaan jam dinding/meja
5 . 2 . 3 . 15 . 3	Belanja Modal Pengadaan Karpets
5 . 2 . 3 . 15 . 4	Belanja Modal Pengadaan Teralis
5 . 2 . 3 . 15 . 5	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Lainnya
5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
5 . 2 . 3 . 16 . 1	Belanja modal Pengadaan kamera
5 . 2 . 3 . 16 . 2	Belanja modal Pengadaan handycam
5 . 2 . 3 . 16 . 3	Belanja modal Pengadaan proyektor
5 . 2 . 3 . 16 . 4	Belanja Modal Pengadaan Sound System
5 . 2 . 3 . 16 . 5	Belanja Modal pengadaan alat-alat studio lainnya
5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
5 . 2 . 3 . 17 . 1	Belanja modal Pengadaan telepon
5 . 2 . 3 . 17 . 2	Belanja modal Pengadaan faximili
5 . 2 . 3 . 17 . 3	Belanja modal Pengadaan radio SSB
5 . 2 . 3 . 17 . 4	Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)
5 . 2 . 3 . 17 . 5	Belanja modal Pengadaan radio VHF
5 . 2 . 3 . 17 . 6	Belanja modal Pengadaan radio UHF
5 . 2 . 3 . 17 . 7	Belanja modal Pengadaan alat sandi
5 . 2 . 3 . 17 . 8	Belanja Modal Pengadaan Alat Radio
5 . 2 . 3 . 17 . 9	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi Lainnya
5 . 2 . 3 . 18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur
5 . 2 . 3 . 18 . 1	Belanja modal Pengadaan timbangan
5 . 2 . 3 . 18 . 2	Belanja modal Pengadaan teodolite
5 . 2 . 3 . 18 . 3	Belanja modal Pengadaan alat uji emisi
5 . 2 . 3 . 18 . 4	Belanja modal Pengadaan alat GPS
5 . 2 . 3 . 18 . 5	Belanja modal Pengadaan kompas/peralatan navigasi
5 . 2 . 3 . 18 . 6	Belanja modal Pengadaan bejana ukur
5 . 2 . 3 . 18 . 7	Belanja modal Pengadaan barometer
5 . 2 . 3 . 18 . 8	Belanja modal Pengadaan seismograph
5 . 2 . 3 . 18 . 9	Belanja modal Pengadaan ultrasonograph
5 . 2 . 3 . 18 . 10	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya
5 . 2 . 3 . 19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
5 . 2 . 3 . 19 . 1	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum
5 . 2 . 3 . 19 . 2	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran gigi
5 . 2 . 3 . 19 . 3	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran THT
5 . 2 . 3 . 19 . 4	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran mata
5 . 2 . 3 . 19 . 5	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran bedah
5 . 2 . 3 . 19 . 6	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran anak
5 . 2 . 3 . 19 . 7	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan
5 . 2 . 3 . 19 . 8	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran kulit dan kelamin
5 . 2 . 3 . 19 . 9	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran kardiologi
5 . 2 . 3 . 19 . 10	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran neurologi
5 . 2 . 3 . 19 . 11	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran orthopedi
5 . 2 . 3 . 19 . 12	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran hewan
5 . 2 . 3 . 19 . 13	Belanja modal Pengadaan alat-alat farmasi
5 . 2 . 3 . 19 . 14	Belanja modal Pengadaan alat-alat penyakit dalam/internis
5 . 2 . 3 . 19 . 15	Belanja Modal pengadaan alat-alat kedokteran lainnya
5 . 2 . 3 . 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium
5 . 2 . 3 . 20 . 1	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium biologi
5 . 2 . 3 . 20 . 2	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium fisika/geologi/geodesi
5 . 2 . 3 . 20 . 3	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium kimia
5 . 2 . 3 . 20 . 4	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium pertanian
5 . 2 . 3 . 20 . 5	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium peternakan
5 . 2 . 3 . 20 . 6	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium perkebunan
5 . 2 . 3 . 20 . 7	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium perikanan

KODE REKENING	URAIAN
5 . 2 . 3 . 20 . 8	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium bahasa
5 . 2 . 3 . 20 . 9	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium lainnya
5 . 2 . 3 . 21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
5 . 2 . 3 . 21 . 1	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan
5 . 2 . 3 . 21 . 2	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan fly over
5 . 2 . 3 . 21 . 3	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan under pass
5 . 2 . 3 . 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan
5 . 2 . 3 . 22 . 1	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air
5 . 2 . 3 . 22 . 2	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan orang
5 . 2 . 3 . 22 . 3	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan gantung
5 . 2 . 3 . 22 . 4	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan ponton
5 . 2 . 3 . 22 . 5	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Lainnya
5 . 2 . 3 . 23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
5 . 2 . 3 . 23 . 1	Belanja modal Pengadaan konstruksi bendungan
5 . 2 . 3 . 23 . 2	Belanja modal Pengadaan konstruksi waduk
5 . 2 . 3 . 23 . 3	Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal permukaan
5 . 2 . 3 . 23 . 4	Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal bawah tanah
5 . 2 . 3 . 23 . 5	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi
5 . 2 . 3 . 23 . 6	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum
5 . 2 . 3 . 23 . 7	Belanja modal Pengadaan konstruksi reservoir
5 . 2 . 3 . 23 . 8	Belanja modal Pengadaan konstruksi pintu air
5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota
5 . 2 . 3 . 24 . 1	Belanja modal Pengadaan lampu hias jalan
5 . 2 . 3 . 24 . 2	Belanja modal Pengadaan lampu hias taman
5 . 2 . 3 . 24 . 3	Belanja modal Pengadaan lampu penerang hutan kota
5 . 2 . 3 . 24 . 4	Belanja Pengadaan Penerangan Jalan, Taman & Hutan Kota lainnya
5 . 2 . 3 . 25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
5 . 2 . 3 . 25 . 1	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik
5 . 2 . 3 . 25 . 2	Belanja modal Pengadaan instalasi telepon
5 . 2 . 3 . 25 . 3	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan telepon lainnya
5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan
5 . 2 . 3 . 26 . 1	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
5 . 2 . 3 . 26 . 2	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah jabatan
5 . 2 . 3 . 26 . 3	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas
5 . 2 . 3 . 26 . 4	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang
5 . 2 . 3 . 26 . 5	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan bersejarah
5 . 2 . 3 . 26 . 6	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan monumen
5 . 2 . 3 . 26 . 7	Belanja modal Pengadaan konstruksi tugu peringatan
5 . 2 . 3 . 26 . 8	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pasar/Toko/Kios/Los
5 . 2 . 3 . 26 . 9	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Sarana Ibadah
5 . 2 . 3 . 26 . 10	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Taman
5 . 2 . 3 . 26 . 11	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Sarana Wisata
5 . 2 . 3 . 26 . 12	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Sarana Pendidikan
5 . 2 . 3 . 26 . 13	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Sarana Olahraga
5 . 2 . 3 . 26 . 14	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Sarana Kesehatan
5 . 2 . 3 . 26 . 15	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian dermaga
5 . 2 . 3 . 26 . 16	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Lainnya
5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
5 . 2 . 3 . 27 . 1	Belanja modal Pengadaan buku matematika
5 . 2 . 3 . 27 . 2	Belanja modal Pengadaan buku fisika
5 . 2 . 3 . 27 . 3	Belanja modal Pengadaan buku kimia
5 . 2 . 3 . 27 . 4	Belanja modal Pengadaan buku biologi
5 . 2 . 3 . 27 . 5	Belanja modal Pengadaan buku biografi
5 . 2 . 3 . 27 . 6	Belanja modal Pengadaan buku geografi
5 . 2 . 3 . 27 . 7	Belanja modal Pengadaan buku astronomi
5 . 2 . 3 . 27 . 8	Belanja modal Pengadaan buku arkeologi
5 . 2 . 3 . 27 . 9	Belanja modal Pengadaan buku bahasa dan sastra
5 . 2 . 3 . 27 . 10	Belanja modal Pengadaan buku keagamaan
5 . 2 . 3 . 27 . 11	Belanja modal Pengadaan buku sejarah

KODE REKENING	URAIAN
5 . 2 . 3 . 27 . 12	Belanja modal Pengadaan buku seni dan budaya
5 . 2 . 3 . 27 . 13	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum
5 . 2 . 3 . 27 . 14	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan sosial
5 . 2 . 3 . 27 . 15	Belanja modal Pengadaan buku ilmu politik dan ketatanegaraan
5 . 2 . 3 . 27 . 16	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan dan teknologi
5 . 2 . 3 . 27 . 17	Belanja modal Pengadaan buku ensiklopedia
5 . 2 . 3 . 27 . 18	Belanja modal Pengadaan buku kamus bahasa
5 . 2 . 3 . 27 . 19	Belanja modal Pengadaan buku ekonomi dan keuangan
5 . 2 . 3 . 27 . 20	Belanja modal Pengadaan buku industri dan perdagangan
5 . 2 . 3 . 27 . 21	Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan
5 . 2 . 3 . 27 . 22	Belanja modal Pengadaan buku naskah
5 . 2 . 3 . 27 . 23	Belanja modal Pengadaan terbitan berkala (jurnal, Compact Disk)
5 . 2 . 3 . 27 . 24	Belanja modal Pengadaan mikrofilm
5 . 2 . 3 . 27 . 25	Belanja modal Pengadaan peta/atlas/globe
5 . 2 . 3 . 27 . 26	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan Lainnya
5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan
5 . 2 . 3 . 28 . 1	Belanja modal Pengadaan lukisan/foto
5 . 2 . 3 . 28 . 2	Belanja modal Pengadaan patung
5 . 2 . 3 . 28 . 3	Belanja modal Pengadaan ukiran
5 . 2 . 3 . 28 . 4	Belanja modal Pengadaan pahatan
5 . 2 . 3 . 28 . 5	Belanja modal Pengadaan batu alam
5 . 2 . 3 . 28 . 6	Belanja modal Pengadaan maket/miniaturn/diorama
5 . 2 . 3 . 28 . 7	Belanja Modal Pengadaan Barang Kesenian & kebudayaan lainnya
5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman
5 . 2 . 3 . 29 . 1	Belanja modal Pengadaan Tanaman
5 . 2 . 3 . 29 . 2	Belanja modal Pengadaan hewan/ternak
5 . 2 . 3 . 29 . 3	Belanja modal Pengadaan Hewan/ternak & tanaman lainnya
5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan
5 . 2 . 3 . 30 . 1	Belanja modal Pengadaan senjata api
5 . 2 . 3 . 30 . 2	Belanja modal Pengadaan radar
5 . 2 . 3 . 30 . 3	Belanja modal Pengadaan mobil water canon
5 . 2 . 3 . 30 . 4	Belanja modal Pengadaan borgol
5 . 2 . 3 . 30 . 5	Belanja modal Pengadaan sangkur/bayonet
5 . 2 . 3 . 30 . 6	Belanja modal Pengadaan perisai/tameng
5 . 2 . 3 . 30 . 7	Belanja modal Pengadaan detektor logam
5 . 2 . 3 . 30 . 8	Belanja modal Pengadaan rompi anti peluru
5 . 2 . 3 . 30 . 9	Belanja modal Pengadaan pentungan
5 . 2 . 3 . 30 . 10	Belanja modal Pengadaan helm
5 . 2 . 3 . 30 . 11	Belanja modal Pengadaan alarm/sirene
5 . 2 . 3 . 30 . 12	Belanja modal Pengadaan sentolop/senter
5 . 2 . 3 . 30 . 13	Belanja Modal Pengadaan Rompi Pelampung
5 . 2 . 3 . 30 . 14	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan Lainnya
5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Pengadaan Software
5 . 2 . 3 . 31 . 1	Belanja Modal Pengadaan Software
5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Perikanan
5 . 2 . 3 . 32 . 1	Belanja Modal Pengadaan Alat Penangkap Ikan
5 . 2 . 3 . 32 . 2	Belanja Modal Pengadaan Alat Bantu Penangkap Ikan
5 . 2 . 3 . 32 . 3	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Perikanan Lainnya
5 . 2 . 3 . 33	Belanja Modal Pengadaan Fasilitas Perhubungan Darat
5 . 2 . 3 . 33 . 1	Belanja Modal Pengadaan Rambu Lalu Lintas
5 . 2 . 3 . 33 . 2	Belanja Modal Pengadaan Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan
5 . 2 . 3 . 33 . 3	Belanja Modal Pengadaan Pagar Pengaman Jalan
5 . 2 . 3 . 33 . 4	Belanja Modal Pengadaan Pemasangan Marka Jalan
5 . 2 . 3 . 33 . 5	Belanja Modal Pengadaan Pemasangan Paku Jalan
5 . 2 . 3 . 33 . 6	Belanja Modal Pengadaan Pemasangan Lampu Peringatan LL
5 . 2 . 3 . 33 . 7	Belanja Modal Peng. Pemasangan Alat Pengendali Isyarat LL
5 . 2 . 3 . 33 . 8	Belanja Modal Peng. Pemasangan Patok Tikungan Pipa Plastik
5 . 2 . 3 . 33 . 9	Belanja Modal Peng. Pemasangan Patok Tikungan Pipa Besi
5 . 2 . 3 . 33 . 10	Belanja Modal Peng. Pemasangan Cermin Tikungan

KODE REKENING	URAIAN
5 . 2 . 3 . 33 . 11	Belanja Modal Peng. Pemasangan Kerucut Lalu Lintas
5 . 2 . 3 . 33 . 12	Belanja Modal Pengadaan Timbangan Portabel
5 . 2 . 3 . 33 . 13	Belanja Modal Pengadaan Fasilitas Perhubungan Darat Lainnya
5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Pengadaan Fasilitas Perhubungan Laut
5 . 2 . 3 . 34 . 1	Belanja Modal Pembangunan Dermaga beton
5 . 2 . 3 . 34 . 2	Belanja Modal Pembangunan Causeway
5 . 2 . 3 . 34 . 3	Belanja Modal Pembangunan Talud
5 . 2 . 3 . 34 . 4	Belanja Modal Pembangunan Menara Suar
5 . 2 . 3 . 34 . 5	Belanja Modal Pengadaan Fasilitas Perhubungan Laut Lainnya
6	PEMBIAYAAN DESA
6 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DESA
6 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya
6 . 1 . 1 . 1	Pelampauan Penerimaan PADes
6 . 1 . 1 . 1 . 1	Pelampauan Penerimaan PADes
6 . 1 . 1 . 2	Pelampauan Penerimaan Bagi Hasil
6 . 1 . 1 . 2 . 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
6 . 1 . 1 . 3	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
6 . 1 . 1 . 3 . 1	Pendapatan Hibah
6 . 1 . 1 . 3 . 2	Dana Darurat
6 . 1 . 1 . 3 . 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
6 . 1 . 1 . 3 . 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
6 . 1 . 1 . 4	Sisa penghematan Belanja atau akibat lainnya
6 . 1 . 1 . 4 . 1	Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung
6 . 1 . 1 . 4 . 2	Belanja Pegawai dari Belanja Langsung
6 . 1 . 1 . 4 . 3	Belanja Barang dan Jasa
6 . 1 . 1 . 4 . 4	Belanja Modal
6 . 1 . 1 . 4 . 5	Belanja Bunga
6 . 1 . 1 . 4 . 6	Belanja Subsidi
6 . 1 . 1 . 4 . 7	Belanja Hibah
6 . 1 . 1 . 4 . 8	Belanja Bantuan Sosial
6 . 1 . 1 . 4 . 9	Belanja Bagi hasil
6 . 1 . 1 . 4 . 10	Belanja Bantuan Keuangan
6 . 1 . 1 . 4 . 11	Belanja Tidak Terduga
6 . 1 . 1 . 4 . 12	Pembiayaan Netto Th. sebelumnya
6 . 1 . 2	Pencairan Dana Cadangan
6 . 1 . 2 . 1	Pencairan Dana Cadangan
6 . 1 . 2 . 1 . 1	Pencairan Dana Cadangan nomor....
6 . 1 . 3	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan
6 . 1 . 3 . 1	Hasil penjualan perusahaan milik desa/BUMDes
6 . 1 . 3 . 1 . 1	BUMDes
6 . 1 . 3 . 1 . 2	Kekayaan Milik Desa
6 . 1 . 4	Penerimaan Piutang Desa
6 . 1 . 4 . 1	Penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah
6 . 1 . 4 . 1 . 1	Penerimaan piutang desa
6 . 1 . 5	Penerimaan Pinjaman Desa
6 . 1 . 5 . 1	Penerimaan Pinjaman Desa
6 . 1 . 5 . 1 . 1	Penerusan pinjaman.....
6 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DESA
6 . 2 . 1	Pembentukan Dana Cadangan
6 . 2 . 1 . 1	Pembentukan Dana Cadangan
6 . 2 . 1 . 1 . 1	Pembentukan Dana Cadangan nomor...
6 . 2 . 2	Penyertaan Modal Desa
6 . 2 . 2 . 1	Badan usaha milik desa (BUMDes)
6 . 2 . 2 . 1 . 1	BUMDes
6 . 2 . 3	Pembayaran Utang
6 . 2 . 3 . 1	Pembayaran cicilan utang
6 . 2 . 3 . 1 . 1	Pembayaran cicilan pokok utang

KODE REKENING	URAIAN
6 . 3	PEMBIAYAAN NETTO
6 . 3 . 1	Pembiayaan Netto
6 . 3 . 1 . 1	Pembiayaan Netto
6 . 3 . 1 . 1 . 1	Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan
6 . 4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
6 . 4 . 1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
6 . 4 . 1 . 1	Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan
6 . 4 . 1 . 1 . 1	Pembiayaan Netto

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAI RUL EFENDI

KODE DAN DAFTAR PROGRAM URUSAN DESA

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN
1					2
x	xx	xx	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Desa
x	xx	xx	1	1	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
x	xx	xx	1	2	Penyediaan jasa surat menyurat
x	xx	xx	1	3	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
x	xx	xx	1	4	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor desa
x	xx	xx	1	5	dan seterusnya.....
x	xx	xx	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Milik Desa
x	xx	xx	2	1	Pengadaan gedung kantor
x	xx	xx	2	2	Pengadaan kendaraan dinas/operasional desa
x	xx	xx	2	3	Pemeliharaan rutin gedung kantor
x	xx	xx	2	4	Pemeliharaan Rutin Peralatan dan Perlengkapan Kantor
x	xx	xx	2	5	dan seterusnya.....
x	xx	xx	3		Program Pengembangan Sosial
x	xx	xx	3	1	Peingkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial
x	xx	xx	3	2	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin
x	xx	xx	3	3	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin
x	xx	xx	3	4	dan seterusnya.....
x	xx	xx	4		Program Pengembangan Pendidikan
x	xx	xx	4	1	Pengembangan sarana prasarana PAUD
x	xx	xx	4	2	Pemberian bantuan operasional pendidikan nonformal
x	xx	xx	4	3	Pemberian bantuan fasilitas pendidikan SD/SMP/SMU yang ada di desa
x	xx	xx	4	4	dan seterusnya.....
x	xx	xx	5		Program Pengembangan Kesehatan
x	xx	xx	5	1	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan
x	xx	xx	5	2	Penyuluhan masyarakat, pola hidup sehat
x	xx	xx	5	3	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
x	xx	xx	5	4	dan seterusnya.....

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAI RUL EFENDI

REALISASI PENGGUNAAN ADD TAHAP.....
 DESA KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN ADD	REALISASI PENGGUNAAN ADD	SISA ANGGARAN s.d TAHAP ...	KET
4.	PENDAPATAN				
4.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah				
4.4.1	ADD				
	Jumlah				
5	BELANJA				
5.1	Belanja Tidak Langsung				
5.1.1	Belanja Pegawai				
5.1.1.1	dan seterusnya.....				
5.1.2	Belanja Subsidi				
5.1.2.1	dan seterusnya.....				
5.1.3	Belanja Hibah				
5.1.3.1	dan seterusnya.....				
5.1.4	Belanja Bantuan Sosial :				
5.1.4.1	dan seterusnya.....				
5.1.5	Belanja Bantuan Keuangan				
5.1.5.1	dan seterusnya.....				
5.1.6	Belanja tak terduga				
5.1.6.1	Keadaan darurat				
5.1.6.2	Bencana alam				
5.1.6.3	dan seterusnya.....				
5.2	Belanja Langsung				
5.2.1	Belanja Pegawai:				
5.2.1.1	Belanja Honorarium Perangkat Desa				
5.2.1.2	dan seterusnya.....				
5.2.2	Belanja Barang/Jasa :				
5.2.2.1	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor				
5.2.2.2	Belanja bahan/material				
2.1.2.3	dan seterusnya.....				

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN ADD	REALISASI PENGGUNAAN ADD	SISA ANGGARAN s.d TAHAP ...	KET
5.2.3	Belanja Modal				
5.2.3.1	Belanja Modal Tanah				
5.2.3.2	Belanja Modal Pengadaan Alat Berat				
5.2.3.3	dan seterusnya.....				
	Jumlah				

....., tanggal

KEPALA DESA

.....

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAI RUL EFENDI